ANTARA KONSERVASI KARYA SENI DAN PUSAKA DI INDONESIA: TINJAUAN DISIPLIN, PROFESI, DAN PRAKTIK PROFESIONAL

Saiful Bakhri¹

¹Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali
saiful.bakhri@kemdikbud.go.id

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang cukup pesat, menyaksikan berkembangnya iklim pasar karya seni dan pengelolaan pusaka/cagar budaya. Fakta ini memunculkan pertanyaan di manakah posisi konservasi karya seni dan pusaka/cagar budaya sebagai sebuah disiplin ilmu, profesi, dan praktik profesional dalam mendukung pelestariannya di Indonesia. Untuk mendalami hal ini, diperlukan pembahasan terhadap definisi konservasi yang berlaku dan/atau dipahami di Indonesia serta mengeksplorasi kebutuhan konservasi yang secara khusus dibutuhkan oleh Indonesia. Didasarkan pada penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah tinjauan literatur dan arsip, analisis kebijakan, dan wawancara semi terstruktur. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan saat ini mendukung konservasi karya seni dan pusaka/cagar budaya, namun, tidak mendukung berkembangnya konservasi sebagai sebuah disiplin ilmu dan profesi. Di samping itu, terlihat jelas perbedaan antara praktik konservasi karya seni dan konservasi pusaka/cagar budaya.

Kata Kunci: konservasi karya seni; disiplin konservasi; kebijakan konservasi; profesi konservasi; konservasi pusaka/cagar budaya

ABSTRACT

Indonesia is witnessing a growth in the art market in addition to the increased protection of its national cultural heritage. This raises questions about the current position of art and heritage conservation as a profession, discipline, and professional practice in Indonesia to support the preservation of its 'old culture(s)'. In addressing the themes of the conference, this paper examines the definition of conservation in Indonesia and explores the opportunities for the renewal of 'old cultures' for an Indonesian practice of conservation to emerge as distinct from other parts of the world. we argue that conservation should meet the 'place-based' dimensions of tradition, living cultures, climate, materiality, and natural disasters. The approach used includes a literature review, archival research, policy analysis and semi-structured interviews. The practices of neighbouring countries are also explored for comparative purposes. The results show that existing policies are in place to support the conservation of cultural materials in Indonesia; however, these do not address the development or sustainability of the profession and discipline for a shared thought style to emerge. The research also indicates that there is a distinct line of separation between the conservation of cultural heritage compared to the fine arts.

Keywords: art conservation; conservation discipline; conservation policy; conservation profession; cultural heritage conservation

PENDAHULUAN

“Kami para pelaku dan pemerhati pelestarian pusaka Indonesia bersyukur bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar dikaruniai Tuhan keanekaragaman kekayaan alam dan budaya yang istimewa, yang menjadi sumber ilham, daya cipta, dan daya hidup. Kesadaran, perhatian, dan upaya untuk pelestarian pusaka Indonesia sudah mulai tumbuh dan diperlukan penguatan yang berkelanjutan.” - Indonesian Network for Heritage Conservation and ICOMOS Indonesia (2003).

Mukadimah yang sangat indah dari Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia ini ditulis untuk memperingati Tahun Pusaka Indonesia 2003 di Ciloto, Jawa Barat. Pembukaan ini menyiratkan bahwa terdapat keunikan pusaka/cagar budaya di Indonesia yang perlu dilestarikan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Hal tersebut tentu berimplikasi pada tidak terhitungnya pusaka/cagar budaya/material yang dimiliki.

Di sisi lain, Agrawal (1975) berargumen bahwa di negara berkembang kebudayaan tidak menjadi bagian kepentingan nasional ketika disandingkan dengan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Bercermin pada argumen tersebut, hal yang lebih penting untuk dipertanyakan adalah apakah ‘potongan kue yang lebih besar’ akan serta merta meningkatkan kualitas pelestarian pusaka di Indonesia? Oleh karena itu tentu penting untuk menguji sejarah serta konservasi kontemporer sebagai sebuah disiplin, profesi, dan praktik profesional yang saat ini berkembang.

Konservasi Pasca Modern

Perubahan berbagai disiplin ilmu karena berkembangnya paradigma pasca modern juga mempengaruhi konservasi. Arah saat ini, atau perubahan paradigma dari para akademisi menantang dasar konservasi modern. Konservasi telah berubah dari semata-mata hanya pelestarian material dari artefak menjadi pendekatan berpusat pada manusia dalam pengambilan keputusan dan pemaknaan (Sloggett 2009). Munoz-Vinas (2017) mengusul ide mengenai *Conservation-Induced Alteration* (C-IA) ketika melihat kenyataan bahwa perawatan/konservasi tanpa dipungkiri mengubah aspek fisik objek, sekecil apa pun perubahannya. Selanjutnya, ia mempertanyakan mengenai perawatan/konservasi yang dijamin oleh konservator dapat bertahan lama, ketika objek yang dirawat tersebut terekspos berbagai kondisi lingkungan di luar ruangan laboratorium atau museum. Ia kemudian menekankan bahwa terdapat *costs* dan *benefits* dalam konservasi, tetapi hal ini tidak dapat diukur secara objektif, dan terdapat lebih dari satu jawaban benar atau salah yang bisa dinilai dan diberikan peringkat.

Lebih lanjut lagi, Sloggett (2009) berpendapat untuk kontribusi sosial dan kemanusiaan yang lebih luas dari konservasi bersama dengan perannya untuk mendukung kolaborasi untuk kesinambungan budaya serta strategi yang memperluas peran konservasi di luar institusi formal. Saat ini, kemampuan konservator dalam melibatkan komunitas lintas-budaya merupakan keahlian penting agar dapat berkolaborasi dengan berbagai komunitas dan budaya yang mungkin bersifat disiplin, profesional, dan sosial (Sloggett 2009). Hal ini juga didukung oleh Scott (2015) melalui idenya dalam konservasi pasca *normal* dan model *people-centred*. Tren ini kemudian juga didukung oleh Tse et al. (2018) dengan argumen bahwa saat ini konservator secara aktif lebih melibatkan publik, komunitas, dan individual

serta kelompok yang dapat membantu untuk memahami dan melestarikan koleksi. Tse et al. (2018) dalam artikelnya memberikan contoh di Filipina, yang secara umum juga ditemukan di negara-negara Asia Tenggara lainnya, bahwa tradisi tidaklah hanya berasal dari masa lalu, tetapi dapat ditemukan masih dipraktikkan hingga masa kini. Indonesia, secara umum, memiliki karakteristik yang serupa dengan Filipina dalam hal praktik budaya dan tradisi. Nilai dan praktik modern bangsa Indonesia pada dasarnya diwarisi dari masa lalu. Banyak dari masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi budayanya terlepas dari globalisasi. Selain itu terdapat 1.128 kelompok etnik di seluruh Nusantara (Widiastuti 2013) yang konservator dapat libatkan dalam strategi dan kegiatan pelestarian. Dengan keragaman tersebut, digabungkan dengan apresiasi yang tinggi terhadap kebudayaan tradisional, dapat memberikan peluang yang cukup besar bagi dunia konservasi.

Tay (2014) juga mencatat bahwa kebutuhan berbasis budaya dan tempat dibutuhkan dalam pengembangan profesi konservasi kebudayaan material di Asia Tenggara. Sebagai bagian dari Asia Tenggara, argumen ini tentu cocok bagi Indonesia, yang memiliki lebih dari 428 museum, khususnya ketika mempertimbangkan bahwa Indonesia hanya memiliki sedikit konservator. Jumlah konservator yang memiliki kualifikasi pendidikan resmi di bidang konservasi bahkan lebih sedikit lagi. Sekitar 30 tahun yang lalu, Tjandrasasmita (1989) memberikan keterangan bahwa lulusan sekolah menengah atas sering ditugaskan sebagai konservator dan kesulitan melatih mereka dalam bidang kimia dan material.

Usaha untuk mengadvokasi kebutuhan konservasi di Indonesia dilanjutkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pemerintah memikul tanggung jawab pelestarian cagar budaya yang sebagian besar praktiknya diwarisi dari masa lalu. Fakta ini menyoroti kemungkinan ketegangan antara definisi konservasi di UU No. 11 Tahun 2010 bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa konservasi seiring dengan meningkatnya perekonomian dan iklim seni di Indonesia. Sebagai contoh, meningkatnya pengunjung pada festival seni seperti Jakarta Biennale serta lukisan Raden Saleh yang dibeli oleh kolektor Indonesia dengan harga hampir 120 milyar rupiah pada Januari 2018 (Setiawati, Wylie, and Emilia 2018).

Hal ini mengarahkan publik dan pemahaman mereka tentang konservasi, serta kebutuhan akan sumber daya dalam pelestarian karya seni. Selina Halim menyerukan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konservasi karya seni untuk menghadapi perkembangan iklim seni rupa Indonesia, terutama ketika melihat bahwa negara ini merupakan negara tropis di mana jamur merupakan masalah utama dalam konservasi (Figge 2011). Restorasi yang buruk merupakan masalah berikutnya, Selina mengatakan bahwa hal tersebut lumrah terjadi di Indonesia karena masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dan terkadang berpikir bahwa lebih murah lebih baik, mereka membawa karya seni koleksi mereka ke orang yang tidak terlatih dengan baik. (Figge 2011).

Dalam hal ini, UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tidak memberikan perhatian pada pelestarian karya seni, serta jasa konservasi-restorasi yang disediakan oleh berbagai pihak. Selina merujuk pada kurangnya pendidikan atau pelatihan, yang selanjutnya memunculkan pertanyaan: apa yang dimaksud dengan pelatihan konservasi dan praktik profesional? Clavir (2002) mengartikulasikan fitur profesionalisasi yang ditunjukkan oleh

konservasi: 1. pelatihan di sekolah resmi daripada melalui magang/pelatihan singkat, 2. pengembangan kode etik keprofesian untuk menjaga standar pelayanan dan kualitas, serta 3. pengembangan organisasi formal dan nasional yang menumbuhkan identitas kolektif dan budaya profesional. Mengenai dua poin pertama, di Indonesia tidak terdapat instansi pendidikan pada tingkat tinggi yang memberikan pendidikan konservasi dan tidak terdapat kode etik yang mendasari praktik konservasi. Hal ini memunculkan pertanyaan apa yang harus Indonesia lakukan untuk mengatasi kesenjangan ini sekaligus menyelaraskan praktik konservasinya dengan apa yang saat ini dikenal dengan konservasi pasca-modern.

TUJUAN PENELITIAN

Telah dikemukakan bahwa untuk praktik profesional dan disiplin konservasi kebudayaan material diperlukan peninjauan terhadap kode etik, kode praktik, peraturan di Indonesia dan kebutuhan, kemampuan, sumber daya, lingkungan, keterampilan lokal, pelatihan pelestarian dan standar yang mengatur praktik. Namun, tidak ada satu kerangka pun yang menceritakan perkembangan dan praktik konservasi kebudayaan material di Indonesia. Sehingga, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki pengetahuan dan praktik konservasi yang ada di Indonesia serta untuk menyajikan kemungkinan masa depan konservasi di Indonesia.

METODE

Pendekatan utama dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif. Mengingat tidak adanya studi yang teridentifikasi tentang perkembangan konservasi, disiplin ilmu, profesi, dan praktik profesionalnya di Indonesia, pendekatan induktif cocok digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Pengumpulan data kualitatif digunakan dalam penelitian ini melalui analisis kebijakan terkait dan wawancara semi terstruktur, selain data pendukung seperti tinjauan pustaka, penelitian arsip, dan penelusuran berbasis internet. Menggabungkan kumpulan data ini memberikan pemahaman dasar tentang konservasi di Indonesia dan proyeksi masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konservasi di Indonesia

Di Indonesia tidak terdapat program studi konservasi yang diajarkan pada pendidikan tingkat tinggi, dan komunitas akademis dan profesional yang terbatas. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mendefinisikan konservasi dan konservator di Indonesia. Namun, hal ini tidaklah berarti posisi konservasi di Indonesia tidak berkembang, melainkan untuk berargumen bahwa sistem yang ada saat ini tidak diakui menurut kriteria dan definisi internasional. Telah ada upaya dari beberapa pelaku, termasuk di dalamnya konservator lokal, untuk mengembangkan profesi tersebut di Indonesia. Inisiatif ini dapat dikaji melalui sejarah konservasi Indonesia, lembaga, praktik, buku, artikel, dan dokumen lainnya.

Secara nama resmi, terdapat dua instansi pemerintah Indonesia yang secara khusus mengurus konservasi: Pusat Konservasi Cagar Budaya (PKCB) yang bertanggung jawab untuk konservasi benda-benda koleksi bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Balai Konservasi Borobudur (BKB). Delanghe (1997) menyebutkan bahwa BKB telah berdiri sejak 1991 untuk menjamin pelestarian jangka

panjang Candi Borobudur sebagai Warisan Budaya Dunia. Fasilitas ini tentunya terkait dengan sejarah restorasi Borobudur sebelum ditetapkan sebagai situs warisan dunia sekitar 100 tahun lalu pada periode kolonialisasi Belanda. Saat itu, Theo van Erp ditunjuk oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk merestorasi Candi Borobudur di awal 1900-an (van Erp 2011). Pada saat itu, terdapat pandangan bahwa restorasi monumen apapun dianggap sebagai pencapaian arsitektural.

Melompat ke masa kini, BKB telah mengembangkan penelitian dan pengembangan dalam melibatkan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional akan tumbuhan dan rempah-rempah untuk kebutuhan konservasi. Hal ini dapat terlihat dari karya-karya ilmiah Swastikawati dkk. (2012, 2013, 2014, 2017, serta Nahar Cahyandaru dkk (2008, 2010, 2017, 2020), dan beberapa ahli di BKB lainnya. Menariknya, kearifan lokal tersebut didapatkan melalui proses wawancara, yang menunjukkan bahwa domain pengetahuan tradisional terletak di dalam komunitas.

Di sisi lain, adanya tuntutan membuat pemerintah secara aktif merekrut pegawai negeri untuk mengurus konservasi di berbagai instansi pemerintah. Sebagai contoh pada perekrutan CPNS tahun 2018 dibuka 22 lowongan Konservator, prasyarat untuk mengisi posisi ini adalah Sarjana dibidang Arkeologi, Biologi, Fisika, dan Kimia untuk berbagai Museum dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), serta Kimia dan Desain Grafis untuk posisi yang dibuka di Perpustakaan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan untuk konservasi masih terfokus pada sains material.

Gambar 1. Diagram formasi konservator dalam perekrutan CPNS 2018 di berbagai instansi pemerintah.

Figur ini menunjukkan bahwa latar belakang di bidang Seni Rupa bukanlah prasyarat untuk menjadi konservator di pemerintah Indonesia. Selain itu, konservasi di Indonesia secara historis diisi oleh pegawai negeri, yang sebagian besar diantaranya tidak memiliki pemahaman, kemampuan, latar belakang dan ketertarikan yang memadai (Yulianto and Bakhri 2016). Hal ini mengakibatkan pekerjaan konservasi yang dilakukan hanya terbatas pada kebudayaan material milik negara, dan sebagai konsekuensinya hanya terdapat segelintir individu yang mengurus museum swasta dan kolektor individual. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat garis jelas yang membedakan antara konservator yang bekerja untuk pemerintah memiliki latar belakang yang berbeda dari mereka yang bekerja di swasta.

Di satu sisi, mungkin hal ini baik karena terdapat praktisi yang memenuhi permintaan konservasi seiring dengan berkembangnya iklim pasar seni di Indonesia. Di sisi lainnya, nihilnya organisasi profesi dalam bidang konservasi berarti tidak adanya standar yang mengatur dan mengawasi praktik ini. Hal ini khususnya penting jika terdapat beragam basis keterampilan, pengalaman, dan persyaratan berbasis tempat di Indonesia. Selain itu, dalam menjalankan praktik di swasta, terdapat etika bisnis tertentu yang diawasi oleh para praktisi swasta. Untuk mengatasi masalah tersebut, di Amerika terdapat kelompok *Conservator in Private Practice*, *American Institute for Conservation (AIC)*, yang mengusulkan pentingnya etika bisnis yang baik. Mereka juga mengakui kesulitan dalam melakukan dan mempertahankan standar konservasi yang tinggi jika tidak ada organisasi khusus yang mengawasi praktik konservasi (*CIPP Speciality Group Officers* 2014). Dalam sebuah wawancara khusus, seorang konservator swasta asal Singapura yang memiliki beberapa pengalaman pekerjaan di Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan suatu komunitas yang berfungsi sebagai tempat untuk mendiskusikan berbagai permasalahan konservasi yang ada serta solusinya.

Praktik Profesional Konservasi

Dalam mendefinisikan terminologi ‘profesional’ dalam praktik profesional konservasi sangat berkaitan dengan sejarah dan pentingnya menetapkan definisi profesi, organisasi profesi, kode etik, pedoman praktik, dan dokumen protokol lainnya dalam konservasi kebudayaan materi. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan standar tunggal dalam regulasi praktik konservasi. Namun, terdapat beragam interpretasi dari terminologi oleh konservator karena mereka mewakili berbagai sudut pandang, pengalaman, dan sistem pengetahuan yang mereka refleksikan dalam dokumen (Sease 1998). Meskipun nilai dan standar dapat ditafsirkan secara berbeda (Sease 1998), hal tersebut menyediakan kerangka untuk pedoman kerja secara umum.

Dalam acara *ICOM-CC 17th Triennial Conference* di Melbourne, Sloggett (2014) menejaskan secara komprehensif istilah ‘konservasi’ sebagai kontribusi dari profesionalisasi konservasi. Hal ini muncul setelah definisi profesi dituangkan dalam kertas kerja oleh Agnes Ballestrem pada tahun 1978. Perhatian pada etika dan standar konservasi kebudayaan materi dan pemiliknya merupakan alasan utama dibalik pengembangan dokumen tersebut, selain itu untuk menetapkan persyaratan pendidikan untuk profesi konservasi (*ICOM-CC* 1984).

Dalam membicarakan tidak adanya praktik profesional konservasi yang resmi di Indonesia, terdapat beberapa dokumen kebijakan relevan yang dapat menjadi dasar yang kuat untuk pertumbuhan konservasi di Indonesia. Kajian atas dokumen kebijakan ini menunjukkan bahwa terdapat upaya formal untuk melestarikan kebudayaan materi hingga tingkat tertentu dan beberapa etika konservasi secara tidak langsung tercermin melalui dokumen ini (lihat Tabel 1)

Ketidakberadaan peraturan yang secara tegas mengatur konservator swasta menunjukkan kurangnya intervensi langsung dari pemerintah untuk mencegah aktivitas ilegal seperti pemalsuan karya seni dan pasar ‘gelap’ artefak. Aktivitas ini justru didukung ketika praktik konservasi tidak banyak diatur.

Tabel 1. Etika Konservasi dan kaitannya dengan dokumen kebijakan di Indonesia

Etika Konservasi (CIPP Speciality Group Officers 2014)	UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (2003)
Reversibility	Pasal 53 Ayat 3	
Intervensi Minimum (Minimal Intervention)	Pasal 77 Ayat 2	
Keberlanjutan (Sustainability)	Pasal 2, huruf g	Poin ketiga dalam bagian Kesepakatan
Keaslian (Authenticity)	Pasal 2 huruf e dan i, Pasal 53 Ayat 4, Pasal 77 ayat 2	
Asal Usul (Provenance)	Pasal 2 huruf e dan i	
Kerahasiaan (Confidentiality)	Pasal 39	
Nilai Penting (Significance)	Pasal 5	
Dokumentasi	Pasal 53 Ayat 1 dan 4	
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pasal 54 Ayat 1	

KESIMPULAN

Jika dibandingkan dengan konservasi di negara-negara maju, Indonesia mungkin tidak tertinggal jauh. Artikel ini menunjukkan perkembangan disiplin, profesi, dan praktik profesional konservasi di Indonesia saat ini masih terfragmentasi. Terdapat berbagai upaya dari para akademisi, praktisi, dan jaringan pusaka untuk mengembangkan konservasi di Indonesia. Meskipun tidak terdapat pendidikan di tingkat tinggi, usaha kolaboratif dari pemerintah, para akademisi, dan profesional sangat dibutuhkan untuk mendiskusikan pemecahan masalah terkait keprofesian konservasi. Selain itu, arah konservasi saat ini menunjukkan bahwa konservasi di Indonesia telah selaras dengan perkembangan konservasi yang berbasis komunitas. Berkembangnya kebutuhan dari sektor pemerintah dan swasta berkaitan dengan tumbuhnya jumlah cagar budaya dan iklim seni di Indonesia. Pertumbuhan ini tentunya akan diikuti oleh kebutuhan akan konservator. Sehingga, menjadi hal yang penting bagi orang-orang yang terlibat dalam konservasi di Indonesia untuk memulai ‘panggung’ dialog untuk mendefinisikan profesi konservasi dan kualitas profesional terkait. Menyatukan ide-ide konservasi yang melayani beragam kebudayaan material, benda dan tak benda, serta nilai pentingnya untuk masyarakat Indonesia.

REKOMENDASI

Silva (2003) membahas kekurangan dan ancaman yang dimiliki instansi koleksi seperti museum dan galeri di negara berkembang, termasuk didalamnya kurangnya peralatan memadai serta kurangnya manajemen perawatan preventif dan perlindungan. Pendekatan khusus perlu diambil untuk mencegah bencana alam merusak instansi koleksi ini. Tse et al. (2018) menyebut hal ini sebagai ‘*new normal*’ dan menyerukan kebutuhan untuk konservasi preventif untuk mengembangkan pendekatan yang fleksibel. Hal ini sangat diperlukan

mengingat Indonesia merupakan negara yang secara konstan mengalami berbagai bencana alam. Selain itu, dalam pengembangan pendidikan konservasi di Indonesia, pemerintah dan pendidikan tinggi dapat memanfaatkan keberadaan BKB sebagai institusi yang paling berkembang di bidang konservasi. Sebagai contoh, bukanlah hal yang mustahil jika Universitas Gadjah Mada memanfaatkan letak geografisnya yang secara umum berdekatan dengan BKB untuk menyelenggarakan suatu kolaborasi untuk pendidikan konservasi di tingkat universitas. Begitu juga antara Universitas Indonesia, Institut Kesenian Jakarta, Museum Nasional, Galeri Nasional, dan PKCB. Dengan begitu, terdapat konservator-konservator baru yang memiliki kualifikasi memadai serta dapat memenuhi tumbuh kembangnya kebutuhan konservasi di Indonesia dan menciptakan suatu komunitas profesional agar profesi dan praktik profesional dapat lebih berkembang, memberikan keseimbangan ketika berkolaborasi dengan negara-negara lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada The Grimwade Centre for Cultural Materials Conservation, University of Melbourne tempat di mana penulis mengemban pendidikan Master of Cultural Materials Conservation. Khususnya kepada Dr Nicole Tse, pembimbing tesis penulis yang banyak memberikan arahan dan inspirasi. Tesis tersebut secara singkat tertuang dalam artikel ini. Kepada Professor Robyn Sloggett dan Dr Marcelle Scott yang tanpa lelah berbagi mengenai disiplin ilmu dan keprofesian dalam konservasi di dunia. Kepada kolega Indonesia alumni program di Melbourne, Selina Halim, Lia Sumichan, Laila Fitriani, Gadis Fitriana, dan Patricia Rubi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Om Prakash. 1975. "Asian view of conservation." *Museum* 27 (4): 157-160.
- Cahyandaru, Nahar. 2008. "Bahan Tradisional Tembakau dan Cengkeh sebagai Konservan BCB Kayu." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur* 2 (1): 8-12.
- . 2020. "Traditional Materials: Extract and Essential Oils."
- Cahyandaru, Nahar, and Arif Gunawan. 2010. "Senyawa Aktif dalam Bahan Tradisional." In *Konservasi Cagar Budaya Berbahan Kayu Dengan Bahan Tradisional*, edited by Yustinus Suranto, 34-52. Magelang: Balai Konservasi Borobudur.
- Cahyandaru, Nahar, Sri Wahyuni, and Yudhi Atmaja Hendra Purnama. 2017. "Indonesian Essential As Biocides in Traditional-Based Artefact Conservation Study : A Mini Review." *Jurnal Konservasi Benda Cagar Budaya Borobudur* 11 (1): 22-28.
- CIPP Speciality Group Officers. 2014. "Good Ethics is Good Business: Some Ethical Considerations for Conservators in Private Practice." *AIC News* 39 (6): 3-5.
- Clavir, Miriam. 2002. *Preserving what is valued: Museums, conservation, and First Nations*. Vancouver: UBC Press.
- Delanghe, Philippe. 1997. "Monitoring of Indonesian World Cultural Heritage (Borobudur Temple)." In *Preservation and Conservation of Cultural Heritage in Indonesia*, edited by Eko Budihardjo. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Figge, Katrin. 2011. "First Aid for Indonesian Art." Jakarta Globe. Accessed 23 September. <http://jakartaglobe.id/archive/first-aid-for-indonesian-art/>.
- ICOM-CC. 1984. "The Conservator-Restorer: a Definition of the Profession." Accessed 7 September. <http://www.icom-cc.org/47/about/definition-of-profession-1984/>.
- Indonesian Network for Heritage Conservation, and ICOMOS Indonesia. 2003. *Indonesia Charter for Heritage Conservation*. Ciloto.

- Munoz-Vinas, Salvador. 2017. *The Transactional Nature of Heritage Conservation*. Amsterdam: Reinwardt Academy: Amsterdam University of the Arts.
- Scott, Marcelle. 2015. "Normal and extraordinary conservation knowledge: Towards a post-normal theory of cultural materials conservation." *AICCM Bulletin* 36 (1): 3-12.
- Sease, C. 1998. "Codes of ethics for conservation." *International Journal of Cultural Property* 7 (1): 98-115. <https://doi.org/10.1017/S0940739198770092>.
<https://www.cambridge.org/core/article/codes-of-ethics-for-conservation/0F09A5753E9106B7F8A1284FEEEE89B3>.
- Setiawati, Indah, Reuben Wylie, and Stevie Emilia. 2018. "Raden Saleh painting hammered at Rp 119.9 billion." *The Jakarta Post*, 2018.
- Silva, Nimal De. 2003. "Preparedness and Response for Cultural Heritage in Developing Countries." *Cultural Heritage Disaster Preparedness and Response*, Hyderabad, India.
- Sloggett, R. J. 2009. "Expanding the Conservation Canon Assessing Cross-Cultural and Interdisciplinary Collaborations in Conservation." *Studies in Conservation* 54: 170-183.
- . 2014. "What is "conservation"? An examination of the continued relevance of ICOM-CC's', The Conservator-Restorer: a Definition of the Profession." *ICOM-CC 17th Triennial Conference Preprints*, Melbourne, Melbourne.
- Swastikawati, Ari, Rifqi Kurniadi Suryanto, and Al Widy Purwoko. 2012. *Metode Konservasi Tradisional (Penjamasan) Cagar Budaya Berbahan Logam Besi*. Edited by Timbul Haryanto and Endang Tri Wahyuni. Magelang: Balai Konservasi Borobudur.
- Swastikawati, Ari. 2013. "Identifikasi Zat Aktif Dalam Ekstrak Tanaman, Tes Anti Jamur dan Anti Serangga." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur* 7 (1): 16-22.
- Swastikawati, Ari, Henny Kusumawati, Rony Muhammad, Heri Yulianto, and Yudi Atmaja Hendra Purnama. 2014. *Konservasi Logam dengan Bahan Tradisional*. Balai Konservasi Borobudur (Magelang).
- Swastikawati, Ari, Henny Kusumawati, Rifqi Kurniadi Suryanto, and Yudi Atmaja Hendra Purnama. 2017. "Tanin Sebagai Inhibitor Korosi Artefak Besi Cagar Budaya." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur* 11 (1): 3-21.
- Tay, Diana. 2014. "Decision Making and Care of Contemporary South-East Asian Art: An Ecological Framework." *Master of Arts Minor Thesis*, Centre for Cultural Materials Conservation, The University of Melbourne.
- Tjandrasasmita, Uka. 1989. *Final Report: SPAFA-ICCROM Seminar on Conservation Standards in Southeast Asia*.
- Tse, Nicole, Ana Maria Theresa P. Labrador, Marcelle Scott, and Roberto Balarbar. 2018. "Preventive Conservation: People, Objects, Place and Time in the Philippines." *Studies in Conservation* 63 (sup1): 274-281.
<https://doi.org/10.1080/00393630.2018.1476963>.
- van Erp, A.J.Th. (Guus). 2011. "Life and Work of Theo van Erp." In *100 Tahun Pascapemugaran Candi Borobudur*, edited by Haryani Santiko, 01. The Hague.
- Widiastuti. 2013. "Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia." *Jurnal Ilmiah Widya* 4 (2).
- Yulianto, Kresno, and Saiful Bakhri. 2016. "Menjawab Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN Melalui Museum." *Parlementaria*, 22-27.